



# **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)**

# DASAR HUKUM

- ✓ TAP MPRS NO. XI/MPR/1998 TTG PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
- ✓ UU NO.28 TAHUN 1999 TTG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
- ✓ UU NO. 30 TAHUN 2002 TTG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANAKORUPSI
- ✓ INPRES NO. 5 TAHUN 2004 TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- ✓ PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 TTG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
- ✓ PERATURAN KPK NOMOR 2 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 07 TAHUN 2016 TTG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
- ✓ SE MENPAN NOMOR SE/03/M.PAN/01/2005 TTG LHKPN

# LHKPN KOTA BIMA

- ✓ **PERATURAN WALIKOTA BIMA NO. 43 THN 2021 TTG LHKPN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA**
- ✓ **KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA NO. 188.45/539/800/VI/2023 TTG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LHKPN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA**

# TUGAS UNIT PENGELOLA LHKPN

1. Menyusun Data Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Bima yang Wajib LHKPN
2. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN, Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan Pengelolaan data Wajib LHKPN dan Pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WajibLHKPN maupun PL
3. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Instansinya untuk memenuhi kewajiban Penyampaian dan pengumuman LHKPN
4. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib LHKPN yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota Bima
5. Melakukan Verifikasi pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemuakhiran data Wajib LHKPN dan Membuat akun admin unit kerja
6. Memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Wajib LHKPN
7. Melakukan pemuakhiran data Wajib LHKPN
8. Melakukan pengaktifan akun Wajib LHKPN, sehingga dapat menggunakan modul e-filing
9. Melakukan Peremajaan data kepegawaian Wajib LHKPN secara berkala karena terjadi penempatan PNS ( Mutasi, Rotasi, Promosi) pada Aplikasi Wajib LHKPN

# WAJIB LHKPN KOTA BIMA

- ✓ WALIKOTA BIMA
- ✓ WAKIL WALIKOTA BIMA
- ✓ PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
- ✓ PEJABAT ADMINISTRATOR
- ✓ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
- ✓ AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH
- ✓ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
- ✓ PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
- ✓ PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
- ✓ BENDAHARA PADA PERANGKAT DAERAH
- ✓ PENYELENGGARA NEGARA TERTENTU ATAS PERMINTAAN KPK

# LAPORAN PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2022

PER 14 NOVEMBER 2023

PEJABAT	JML	SUDAH LAPOR	BELUM LAPOR	KET.
PIMPINAN	2	2	0	
ESELON II	24	24	0	
ESELON III	138	138	0	
FUNGSIONAL AUDITOR, PPUPD, PLPBJ	38	38	0	
BENDAHARA	50	50	0	
BUMD	1	1	0	
JUMLAH TOTAL	253	253	0	